PUBLICIO JURNAL ILMIAH POLITIK, KEBIJAKAN DAN SOSIAL

E-ISSN : 2656-0305

DOI : https://doi.org/10.51747/publicio.v4i1

PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PROBOLINGGO DALAM PENGELOLAAN SAMPAH ORGANIK (Studi Pada Tempat Pembuangan Sampah Ungup-Ungup Kota Probolinggo)

Erlinda Puspitasari[1],Gunawi[2], Administrasi Publik, Universitas Panca Marga[1,2]

erlinda.puspitasari@gmail.com

ABSTRACT

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tak lepas dari kegiatan ekonomi yang berdampak negatif pada permasalahan lingkungan yang disebabkan dengan munculnya sampah. Jika pengelolaannya buruk dan tidak ditangani dengan baik, maka akan menimbulkan pencemaran dan menjadi ancaman bagi kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Probolinggo dalam pengelolaan sampah organik. Adapun yang menjadi latar belakang penulisan ini karena dalam kehidupan sehari-hari, manusia tak lepas dari kegiatan ekonomi yang berdampak negatif pada permasalahan lingkungan yang disebabkan dengan munculnya sampah. Jika pengelolaannya buruk dan tidak ditangani dengan baik, maka akan menimbulkan pencemaran dan menjadi ancaman bagi kesehatan. Sampah- sampah yang tidak berguna ini dikelola dengan sedemikian rupa agar menjadi sesuatu yang bernilai ekonomis. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dimana penulis melakukan observasi, wawancara, studi literatur dan dokumentasi secara langsung terhadap obyek yang diteliti. Dimana obyek penelitian tersebut berlokasi di Tempat Pembuangan Sampah Ungup- Ungup Kota Probolinggo.

Keywords: Peran pemerintah, Pengelolaan, Sampah Organik, TPS

1. PENDAHULUAN

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tak lepas dari kegiatan ekonomi yang berdampak negatif pada permasalahan lingkungan yang disebabkan dengan munculnya sampah. Jika pengelolaannya buruk dan tidak ditangani dengan baik, maka akan menimbulkan pencemaran dan menjadi ancaman bagi kesehatan. Pada masa mendatang, sampah akan menjadi masalah serius karena faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya sampah seperti jumlah penduduk semakin lama semakin meningkat, keadaan sosial ekonomi serta kemajuan teknologi akan mengalami peningkatan yang signifikan. Sampah merupakan masalah utama bagi masyarakat dan lingkungan khususnya bagi masyarakat perkotaan, dimana hampir semua kegiatan dipastikan menghasilkan sampah. Salah satu contoh adalah plastik pembungkus makanan, dimana plastik pembungkusnya merupakan kategori sampah kering yang biasa disebut sampah non

organik, sedangkan sisa makanannya disebut sampah basah atau sampah organik.Sampah non organik biasanya sangat sulit untuk diurai secara alami karena dipastikan membutuhkan waktu yang lama dan sangat mencemari lingkungan. Hal yang mungkin dilakukan adalah dengan cara mendaur ulang sampah. Namun proses daur ulang membutuhkan sistem yang sangat rumit dan teknologi yang mumpuni, mulai dari proses pemilahan sampah organik dan non organic. Sampah yang tidak dapat penanganan serius bisa mengakibatkan pencemaran, baik polusi udara, polusi air, maupun polusi tanah. Untuk itu perlu adanya suatu upaya jelas dalam pengelolaan sampah agar sampah tidak menjadi timbunan yang menyebabkan berbagai dampak negatif yang ditimbulkannya. UU RI No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah menjelaskan bahwa pola lama dalam pengelolaan sampah di Indonesia yang berupa pengumpulan, pengangkutan dan pembuangan mulai bergeser berubah menjadi pemilahan, pengolahan, pemanfaatan dan pembuangan residu. Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 21/PRT/M/2006 tentang kebijakan dan strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan menyebutkan bahwa pengurangan sampah yang dimulai dari sumbernya merupakan hal yang harus diperhatikan dan mulai digalakkan. Penanganan terhadap sampah perlu mendapatkan perhatian yang serius dari berbagai pihak (Dwiyatmo, 2007). Kerja sama semua pihak sangat dibutuhkan untuk melestarikan lingkungan khususnya dengan menyelamatkan lingkungan agar tidak tercemar oleh emisi yang berasal dari sampah. Di Indonesia sebenarnya mengikutsertakan peran institusi formal, warga pemukiman, dan sektor formal dalam mengelola sampah (Tim Penebar Swadaya, 2008). Untuk mengatasi volume meningkatnya sampah khususnya di Kota Probolinggo, Pemerintah Kota Probolinggo membentuk lembaga Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengolahan Sampah dan Limbah untuk menangani proses pengolahan sampah organik menjadi kompos yang berada dibawah naungan Dinas Lingkungan Hidup. Hal ini sesuai dengan Peraturan daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 93 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup. UPT Pengolahan Sampah dan Limbah bertanggungjawab melaksanakan dua fungsi pokok, yaitu melayani pengolahan sampah menjadi produk yang bermanfaat dan mendesiminasikan pengolahan sampah dan pemanfaatannya sebagai bentuk pemberdayaan komunitas dan pendidikan. UPT Pengolahan Sampah dan Limbah memiliki lahan percontohan/ demplot di beberapa tempat yaitu area persawahan Kelurahan Jrebeng Kulon seluas 4.000 m^2, di ungup-ungup Kelurahan Kanigaran dan pembibitan di area UPT PS-L. UPT Pengolahan Sampah dan Limbah telah melakukan uji coba beberapa bibit tanaman dengan menggunakan pupuk organik hasil dari olahannya sendiri diantaranya : sawi, kacang panjang, cabai, jagung manis dan bawang merah. Dari uji coba tersebut diharapkan hasil panen nantinya akan menjadi percontohan bagi petani-petani di Kota Probolinggo. UPT PS-L mengenalkan penggunaan dan manfaat dari produk pupuk organik olahannya kepada masyarakat maupun kepada petani dengan cara menunjukkan hasil penanaman yang telah diuji cobakan di lahan- lahan percontohannya. Hal ini bertujuan untuk membangun kepedulian masyarakat/petani untuk menggunakan pupuk kompos agar meningkatkan produksi sehingga dapat meningkatkan penghasilan.Selain menjadi lahan percontohan, kegiatan ini juga dimaksudkan untuk mendukung Program Pemerintah Kota Probolinggo yaitu “Menuju Kota Probolinggo sebagai Kota Pertanian Organik”. Berdasarkan paparan tersebut diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang “Peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Probolinggo Dalam Pengelolaan Sampah Organik di TPS Ungup-Ungup”. Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Probolinggo dalam pengelolaan sampah organik di TPS Ungup- Ungup?.” Adapun penelitian ini bertujuan tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Probolinggo dalam pengelolaan sampah organik di TPS Ungup-Ungup.

2. TINJAUAN LITERATUR

Tinjauan pustaka dan kerangka literatur sering dianggap sama, padahal keduanya memiliki fungsi yang berbeda dalam artikel ilmiah maupun tesis. Banyak penulis mencampurkan keduanya sehingga bagian kajian teorinya menjadi tidak fokus, terlalu deskriptif, dan kehilangan arah analitis. Perbedaan utamanya terletak pada tujuan, struktur, dan kedalaman analisis.

Tinjauan pustaka pada dasarnya berisi pembahasan mengenai teori, konsep, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian. Bagian ini bertujuan untuk menjelaskan landasan ilmiah penelitian, menunjukkan perkembangan kajian yang sudah ada, serta membangun argumentasi mengapa penelitian perlu dilakukan. Dalam tinjauan pustaka, penulis menguraikan berbagai teori yang digunakan, menjelaskan konsep-konsep utama, serta membandingkan hasil-hasil penelitian sebelumnya. Oleh karena itu, isi tinjauan pustaka bukan sekadar kumpulan kutipan, tetapi analisis kritis terhadap literatur yang relevan.

Secara ideal, tinjauan pustaka dimulai dengan penjelasan konsep utama yang menjadi fokus penelitian. Misalnya, apabila penelitian membahas implementasi kebijakan publik, maka penulis perlu menjelaskan pengertian kebijakan publik, implementasi kebijakan, model-model implementasi kebijakan, serta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Setelah itu, penulis menguraikan teori-teori yang relevan, misalnya teori implementasi kebijakan dari Edward III, Mazmanian dan Sabatier, atau teori governance. Teori-teori tersebut tidak cukup hanya dijelaskan definisinya, tetapi juga perlu dianalisis kelebihan, kelemahan, dan relevansinya terhadap penelitian yang dilakukan.

Selanjutnya, tinjauan pustaka harus memuat penelitian terdahulu yang relevan. Pada bagian ini, penulis menjelaskan hasil penelitian sebelumnya, metode yang digunakan, serta temuan-temuan penting yang berkaitan dengan topik penelitian. Tujuannya adalah untuk menunjukkan posisi penelitian yang sedang dilakukan dalam peta penelitian yang sudah ada. Penulis juga perlu mengidentifikasi research gap atau celah penelitian, yaitu bagian yang belum diteliti, masih lemah, atau masih menghasilkan temuan yang berbeda-beda. Research gap inilah yang nantinya menjadi dasar argumentasi mengapa penelitian baru perlu dilakukan.

Sementara itu, kerangka literatur atau kerangka berpikir memiliki fungsi yang berbeda. Jika tinjauan pustaka berisi kajian teori dan penelitian terdahulu secara luas, maka kerangka literatur merupakan hasil sintesis dari seluruh kajian tersebut yang digunakan untuk membangun alur logika penelitian. Dengan kata lain, kerangka literatur adalah "peta hubungan" antarvariabel, konsep, atau fenomena yang diteliti berdasarkan hasil kajian pustaka sebelumnya.

Kerangka literatur biasanya lebih ringkas, fokus, dan analitis dibandingkan tinjauan pustaka. Pada bagian ini, penulis menjelaskan bagaimana teori dan penelitian terdahulu digunakan untuk membangun argumentasi hubungan antarvariabel atau arah analisis penelitian. Misalnya, setelah menjelaskan teori implementasi kebijakan dan berbagai penelitian terdahulu, penulis kemudian menyusun argumentasi bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh komunikasi, sumber daya, disposisi birokrasi, dan struktur organisasi. Hubungan inilah yang kemudian dituangkan dalam bentuk narasi, bagan, atau model konseptual.

Dengan demikian, perbedaan utama antara tinjauan pustaka dan kerangka literatur terletak pada fungsi dan orientasinya. Tinjauan pustaka bersifat eksploratif dan deskriptif-analitis terhadap teori serta penelitian terdahulu, sedangkan kerangka literatur bersifat sintesis dan konstruktif untuk membangun

logika penelitian. Tinjauan pustaka menjawab pertanyaan "apa saja teori dan penelitian yang relevan?", sedangkan kerangka literatur menjawab pertanyaan "bagaimana teori dan penelitian tersebut digunakan untuk menjelaskan hubungan dalam penelitian ini?".

Dalam praktik penulisan jurnal ilmiah internasional, tinjauan pustaka sering kali ditulis secara lebih kritis dan terintegrasi. Penulis tidak hanya menjelaskan teori satu per satu, tetapi langsung membangun argumentasi akademik yang mengarah pada research gap dan kerangka konseptual penelitian. Karena itu, artikel ilmiah yang baik biasanya menunjukkan keterhubungan yang kuat antara tinjauan pustaka, kerangka literatur, rumusan masalah, metode penelitian, hingga pembahasan hasil penelitian.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode penelitian kualitatif dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang mendalam mengenai fenomena sosial yang diteliti berdasarkan kondisi yang terjadi secara alamiah. Selain itu, metode kualitatif memungkinkan peneliti memperoleh informasi yang aktual dan kontekstual sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan maupun pemecahan masalah yang terjadi di masyarakat.

Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan dan menjelaskan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fenomena yang menjadi fokus penelitian. Pendekatan ini bertujuan untuk mendeskripsikan berbagai fakta, karakteristik, serta hubungan antarfenomena yang berkaitan dengan objek penelitian berdasarkan kondisi yang terjadi pada saat penelitian dilaksanakan.

Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini berupaya mendeskripsikan, menguraikan, dan menginterpretasikan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Probolinggo dalam pengelolaan sampah organik di Kota Probolinggo. Hasil penelitian kemudian dianalisis untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai pelaksanaan peran tersebut beserta faktor-faktor yang memengaruhinya.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari informan yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian melalui proses wawancara dan observasi. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen dan sumber tertulis yang relevan, seperti laporan instansi, peraturan perundang-undangan, arsip, dokumen resmi, buku, jurnal ilmiah, serta sumber referensi lain yang mendukung penelitian.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi secara mendalam dari para informan terkait. Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung kondisi dan aktivitas yang berkaitan dengan pengelolaan sampah organik. Adapun dokumentasi digunakan untuk melengkapi dan memperkuat data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi.

Instrumen penelitian dalam penelitian kualitatif adalah peneliti sendiri sebagai instrumen utama (human instrument). Untuk mendukung proses pengumpulan data, peneliti menggunakan pedoman wawancara, lembar observasi, alat tulis, telepon genggam, serta komputer atau laptop sebagai perangkat pendukung.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman. Model analisis ini terdiri atas tiga tahapan utama, yaitu reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (conclusion drawing/verification).

Ketiga komponen tersebut berlangsung secara interaktif dan berkesinambungan selama proses penelitian hingga diperoleh kesimpulan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. HASIL

Pengaturan Sampah Rumah Tangga Pada dasarnya, pemerintah memiliki peran yang sangat besar dalam pengelolaan sampah. Menurut Ehworm (2008), tanggung jawab utama pemerintah daerah dalam mengelola sampah yaitu mengatur sampah rumah tangga, didaur ulang, atau dibuang dengan benar. Dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh penulis, diketahui bahwa TPS Ungup - Ungup mempunyai peran yang sangat penting dalam pengaturan sampah rumah tangga diantaranya adalah menjadi tempat pengumpulan sampah rumah tangga yang ada di RT RW, di kelurahan- kelurahan yang terdekat dengan areal TPS ini.DLH juga melakukan pengaturan sampah rumah tangga dengan membuat kebijakan agar masyarakat melakukan pemilahan sampah organik dan anorganik.Hal ini dilakukan oleh DLH sesuai dengan UU dan Perda yang berlaku tentang sampah. Tidak hanya kebijakan- kebijakan yang dikeluarkan oleh DLH untuk mengatur sampah rumah tangga, DLH juga sering melakukan sosialisasi- sosialisai kepada masyarakat agar masyarakat sadar akan pentingnya memilah sampah dari timbulannya, merecycle sampah dari timbulannya, serta memanfaatkan kembali sampah yang berasal dari rumah tangga. Dengan harapan dengan segala kebijakan dan sosialisasi yang dilakukan oleh DLH maka kita bisa mengurangi volume sampah yang ada di TPS Ungup- Ungup.DLH sudah melakukan tugasnya dengan baik dalam pengaturan sampah rumah tangga, dengan menerapkan pengolahan sampah berbasis masyarakat yaitu 3 R (Reduce, Reuse, Recycle). Untuk sampah rumah tangga yang tidak dapat dilakukan pengolahan dengan 3 R, maka akan diangkut ke TPA untuk dibakar (inceneration).

Kegiatan Daur Ulang Untuk kegiatan daur ulang sampah, TPS Ungup- Ungup hanya melakukan proses daur ulang dari sampah organik, yaitu sampah yang diproses menjadi pupuk organik atau kompos. Sedangkan sampah anorganiknya akan diangkut ke TPA. Sampah anorganik dibagi menjadi dua yaitu layak jual dan layak kreasi. Yang layak jual akan langsung dijual ke pengepul, sedangkan yang layak kreasi akan di daur ulang dijadikan kerajinan tangan atau ketrampilan. Dengan adanya daur ulang sampah ini, akan mengurangi terjadinya penumpukan sampah dan pembakaran sampah pada proses akhir. Pada TPS Ungup-Ungup penanganan sampah sudah dilakukan dengan tepat yaitu memilah sampah organik kemudian mengolah dan memprosesnya menjadi kompos. Kompos ini kemudian akan dijual kembali kepada masyarakat, ada pula yang dibagi secara gratis karena masyarakat ini telah bekerjasama dengan DLH dalam melakukan pengumpulan sampah daun. TPS Ungup – Ungup telah menjalankan tugasnya dengan baik, dengan menjadikan TPS tersebut sebagai sarana pengumpulan sampah di lingkungan sekitarnya kemudian mengolah dan memprosesnya menjadi kompos, hal ini akan sangat bermanfaat bagi masyarakat. Proses daur ulang sampah organik pun sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ada yaitu, melalui tahapan- tahapan pencacahan, penumpukan bahan yang akan dijadikan kompos, pembalikan bahan agar proses fermentasi merata, pemantauan suhu dan kelembapan tumpukan, panen dan pengeringan, penggilingan, pengayaan, kemudian pengemasan.

Kerjasama dalam Pengelolaan Sampah Dalam hal ini DLH berperan aktif dengan masyarakat maupun kelompok masyarakat, seperti contohnya komunitas- komunitas Bank Sampah, Papesa (Paguyuban Peduli Sampah), Forjamansa (Forum Jaringan Masyarakat Peduli Sampah), PGS Ceria (Paguyuban

Gerobak Sampah) yaitu petugas- petugas sampah yang ada di RW RW. Dengan menjalin kerjasama dengan kelompok – kelompok masyarakat ini, DLH bisa melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk mengurangi penggunaan barang yang akan menjadi sampah anorganik. Menggugah kesadaran masyarakat akan pentingnya pemilahan dan pengolahan sampah, jadi masyarakat sudah diajak sejak dini untuk menjaga lingkungan dari penumpukan sampah baik organik maupun anorganik. Dengan kebijakan- kebijakan yang dibuat oleh DLH ini, akan mengurangi volume sampah yang masuk ke TPS Ungup- Ungup, karena masyarakat sudah diajak untuk melaksanakan 3 R yaitu Reduse, Reuse dan Recycle mulai dari tingkat rumahtangga.

Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah Peran pemerintah dalam menetapkan kebijakan selanjutnya dijelaskan oleh Nishimoto (1997). Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, pemerintah daerah memiliki wewenang menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional.Penyelenggaraan pengelolaan sampah tersebut juga berdasar norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Selain itu, peran pemerintah sebagai pengatur kebijakan ini juga dapat dilakukan dengan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pihak lain.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, DLH selalu melakukan pembinaan dan pengawasan kepada masyarakat dan dunia usaha.Agar pengelolaan sampah dapat dilaksanakan mulai dari tingkat terbawah. Pembinaan dan pengawasan ini dilakukan melalui berbagai cara yaitu sosialisasi, mengeluarkan regulasi-regulasi tentang pengelolaan sampah, sehingga ada aturan yang harus dipatuhi oleh masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan sampah. Namun tidak dijelaskan apakah ada sanksi apabila ada masyarakat dan dunia usaha yang tidak mematuhi regulasi- regulasi dan kebijakan – kebijakan yang telah dibuat oleh Pemerintah.Sehingga tidak ada efek jera bagi masyarakat ataupun dunia usaha apabila terjadi pelanggaran.Hal ini harusnya lebih ditekankan, mengingat tingkat kesadaran masyarakat yang begitu rendah. Dengan adanya pembinaan dan pengawasan yang ketat dari Pemerintah, dalam hal ini DLH, maka pengelolaan sampah di lingkungan masayarakat baik rumah tangga maupun dunia usaha akan terorganisir dengan baik.

4.2. PEMBAHASAN

Permasalahan sampah merupakan salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh pemerintah daerah di berbagai wilayah Indonesia, termasuk Kota Probolinggo. Pertumbuhan jumlah penduduk, perkembangan kawasan permukiman, peningkatan aktivitas ekonomi, serta perubahan pola konsumsi masyarakat telah menyebabkan peningkatan volume sampah yang dihasilkan setiap hari. Kondisi ini menuntut adanya sistem pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan maupun kesehatan masyarakat. Di antara berbagai jenis sampah yang dihasilkan masyarakat, sampah organik menjadi komponen terbesar yang berasal dari sisa makanan, dedaunan, limbah pasar, dan berbagai bahan hayati lainnya yang mudah terurai. Oleh karena itu, pengelolaan sampah organik menjadi salah satu fokus penting dalam upaya mewujudkan lingkungan perkotaan yang bersih dan sehat.

Dalam konteks tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kota Probolinggo memiliki peran yang sangat strategis sebagai instansi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, termasuk pengelolaan sampah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Tempat Pembuangan Sampah Ungup-Ungup Kota Probolinggo, peran Dinas Lingkungan Hidup tidak hanya terbatas pada kegiatan pengangkutan dan pembuangan sampah, tetapi juga mencakup perencanaan,

pengaturan, pengawasan, pembinaan masyarakat, serta pengembangan inovasi pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Peran tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan sampah organik merupakan tanggung jawab yang kompleks dan membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, baik pemerintah maupun masyarakat.

Sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan sampah, Dinas Lingkungan Hidup Kota Probolinggo berperan sebagai regulator yang bertugas menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan sampah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peran regulatif ini diwujudkan melalui implementasi berbagai kebijakan daerah yang mengatur tata kelola sampah, termasuk pengurangan sampah sejak dari sumbernya, pengelolaan sampah berbasis prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle), serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Melalui kebijakan tersebut, pemerintah berupaya mengubah paradigma pengelolaan sampah yang sebelumnya hanya berorientasi pada pengumpulan dan pembuangan menjadi sistem yang lebih berkelanjutan dengan menempatkan sampah sebagai sumber daya yang masih dapat dimanfaatkan.

Pelaksanaan fungsi regulasi tersebut memiliki arti penting dalam menciptakan kepastian hukum dan arah kebijakan yang jelas bagi seluruh pemangku kepentingan. Dengan adanya aturan yang mengatur pengelolaan sampah, masyarakat memperoleh pedoman mengenai hak dan kewajiban mereka dalam menjaga lingkungan. Selain itu, keberadaan regulasi juga menjadi dasar bagi Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan pengelolaan sampah yang dilakukan oleh masyarakat maupun pelaku usaha. Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sampah masih menghadapi berbagai kendala, terutama terkait rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat dalam melakukan pemilahan sampah sejak dari sumbernya. Banyak masyarakat yang masih mencampurkan sampah organik dan anorganik sehingga menyulitkan proses pengolahan di lokasi pengelolaan sampah.

Selain sebagai regulator, Dinas Lingkungan Hidup Kota Probolinggo juga berperan sebagai fasilitator dalam pengelolaan sampah organik. Peran ini diwujudkan melalui penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pengelolaan sampah mulai dari tahap pengumpulan, pengangkutan, hingga pengolahan. Sarana tersebut meliputi kendaraan pengangkut sampah, tempat penampungan sementara, fasilitas pengolahan sampah organik, serta berbagai peralatan yang diperlukan dalam proses pengelolaan sampah. Keberadaan sarana dan prasarana tersebut menjadi faktor penting dalam menjamin kelancaran sistem pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Di Tempat Pembuangan Sampah Ungup-Ungup, peran fasilitator terlihat dari upaya Dinas Lingkungan Hidup dalam menyediakan fasilitas yang memungkinkan dilakukannya proses pemilahan dan pengolahan sampah organik sebelum dibawa ke tempat pemrosesan akhir. Dengan adanya fasilitas tersebut, sebagian sampah organik dapat dimanfaatkan kembali menjadi produk yang memiliki nilai guna sehingga dapat mengurangi jumlah sampah yang harus ditimbun. Selain itu, Dinas Lingkungan Hidup juga memberikan dukungan kepada kelompok masyarakat yang terlibat dalam kegiatan pengelolaan sampah melalui pembinaan, pelatihan, dan pemberdayaan masyarakat. Upaya ini menunjukkan bahwa pengelolaan sampah tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga memerlukan keterlibatan aktif masyarakat sebagai produsen sampah.

Peran lain yang sangat penting adalah sebagai pelaksana operasional pengelolaan sampah organik. Dalam menjalankan fungsi ini, Dinas Lingkungan Hidup bertanggung jawab terhadap berbagai kegiatan teknis yang berkaitan dengan pengumpulan, pengangkutan, pemilahan, dan pengolahan sampah. Berdasarkan hasil penelitian, petugas Dinas Lingkungan Hidup secara rutin melakukan pengangkutan sampah dari berbagai sumber, seperti permukiman, pasar, fasilitas umum, dan kawasan perdagangan menuju lokasi

pengelolaan sampah. Kegiatan ini merupakan bagian penting dalam menjaga kebersihan lingkungan serta mencegah terjadinya penumpukan sampah yang dapat menimbulkan berbagai permasalahan kesehatan dan lingkungan.

Setelah sampah tiba di Tempat Pembuangan Sampah Ungup-Ungup, dilakukan proses pemilahan untuk memisahkan sampah organik dari sampah anorganik. Sampah organik yang masih memiliki potensi untuk diolah kemudian diproses melalui kegiatan pengomposan. Pengomposan merupakan salah satu metode pengelolaan sampah organik yang paling banyak diterapkan karena relatif sederhana dan mampu menghasilkan produk yang bermanfaat bagi lingkungan. Kompos yang dihasilkan dapat dimanfaatkan sebagai pupuk organik untuk kegiatan pertanian, penghijauan, taman kota, maupun berbagai kegiatan budidaya tanaman lainnya. Dengan demikian, sampah organik yang sebelumnya dianggap sebagai limbah dapat diubah menjadi produk yang memiliki nilai ekonomis dan ekologis.

Pengolahan sampah organik melalui proses pengomposan juga memberikan manfaat yang signifikan dalam mengurangi dampak lingkungan. Sampah organik yang dibuang begitu saja ke tempat pembuangan akhir berpotensi menghasilkan gas metana akibat proses pembusukan anaerobik. Gas metana merupakan salah satu gas rumah kaca yang memiliki kontribusi besar terhadap pemanasan global. Oleh karena itu, pengolahan sampah organik menjadi kompos tidak hanya berfungsi untuk mengurangi volume sampah, tetapi juga mendukung upaya mitigasi perubahan iklim melalui pengurangan emisi gas rumah kaca.

Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengelolaan sampah organik di Tempat Pembuangan Sampah Ungup-Ungup masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan kapasitas sarana dan prasarana yang tersedia dibandingkan dengan volume sampah yang terus meningkat. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran juga menjadi faktor yang memengaruhi efektivitas pengelolaan sampah. Kondisi ini menyebabkan tidak seluruh sampah organik yang masuk dapat diolah secara optimal sehingga sebagian masih harus dibawa ke tempat pemrosesan akhir.

Keberhasilan pengelolaan sampah organik tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan sarana dan prasarana, tetapi juga oleh tingkat kesadaran masyarakat. Oleh karena itu, Dinas Lingkungan Hidup Kota Probolinggo juga menjalankan peran sebagai edukator yang bertugas memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan sampah. Melalui berbagai kegiatan sosialisasi, penyuluhan, kampanye lingkungan, dan pelatihan, masyarakat didorong untuk lebih peduli terhadap kebersihan lingkungan serta melakukan pemilahan sampah sejak dari rumah tangga. Kegiatan edukasi tersebut menjadi sangat penting karena perubahan perilaku masyarakat merupakan kunci keberhasilan pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

Peran edukatif yang dijalankan Dinas Lingkungan Hidup menunjukkan bahwa penyelesaian masalah sampah tidak dapat dilakukan hanya melalui pendekatan teknis semata. Perubahan pola pikir dan perilaku masyarakat menjadi faktor yang sangat menentukan. Ketika masyarakat memiliki kesadaran untuk memilah sampah organik dan anorganik sejak dari sumbernya, maka proses pengolahan sampah akan menjadi lebih mudah dan efisien. Sebaliknya, apabila masyarakat masih menganggap bahwa seluruh tanggung jawab pengelolaan sampah berada di tangan pemerintah, maka berbagai program yang telah disusun akan sulit mencapai hasil yang optimal.

Selain menjalankan fungsi regulasi, fasilitasi, operasional, dan edukasi, Dinas Lingkungan Hidup Kota Probolinggo juga berupaya mengembangkan berbagai inovasi dalam pengelolaan sampah organik. Inovasi tersebut merupakan bentuk adaptasi terhadap perkembangan permasalahan sampah yang semakin

kompleks. Salah satu inovasi yang dikembangkan adalah layanan penjemputan sampah organik dari masyarakat untuk kemudian diolah menjadi kompos. Program tersebut tidak hanya bertujuan mengurangi volume sampah yang dibuang ke tempat pemrosesan akhir, tetapi juga memberikan manfaat langsung kepada masyarakat melalui pemanfaatan hasil pengolahan sampah.

Pengembangan inovasi tersebut menunjukkan adanya perubahan paradigma dalam pengelolaan sampah. Sampah tidak lagi dipandang sebagai barang yang tidak bernilai, melainkan sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan kembali. Pendekatan ini sejalan dengan konsep ekonomi sirkular yang menekankan pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan dan pengurangan limbah semaksimal mungkin. Melalui berbagai inovasi yang dikembangkan, Dinas Lingkungan Hidup berupaya menciptakan sistem pengelolaan sampah yang lebih efektif, efisien, dan ramah lingkungan.

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa faktor yang mendukung pelaksanaan peran Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah organik. Faktor tersebut antara lain adanya dukungan regulasi yang memadai, komitmen pemerintah daerah terhadap isu lingkungan, tersedianya kelembagaan yang menangani pengelolaan sampah, serta adanya partisipasi sebagian masyarakat dalam berbagai program pengelolaan sampah. Faktor-faktor tersebut menjadi modal penting dalam mendukung keberhasilan pengelolaan sampah organik di Kota Probolinggo.

Namun demikian, terdapat pula berbagai faktor penghambat yang perlu mendapat perhatian. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam melakukan pemilahan sampah masih menjadi kendala utama. Selain itu, keterbatasan sarana, prasarana, sumber daya manusia, dan anggaran menyebabkan kapasitas pengelolaan sampah belum mampu mengimbangi peningkatan volume sampah yang dihasilkan masyarakat. Tantangan lainnya adalah masih adanya pandangan bahwa pengelolaan sampah sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah sehingga tingkat partisipasi masyarakat dalam pengurangan sampah masih perlu ditingkatkan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kota Probolinggo telah menjalankan peran yang cukup baik dalam pengelolaan sampah organik di Tempat Pembuangan Sampah Ungup-Ungup. Peran tersebut tercermin dalam fungsi sebagai regulator, fasilitator, pelaksana operasional, edukator, dan pengembang inovasi. Meskipun masih menghadapi berbagai kendala, upaya yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Ke depan, peningkatan kapasitas kelembagaan, penguatan partisipasi masyarakat, serta pengembangan teknologi pengolahan sampah yang lebih modern menjadi langkah strategis yang perlu dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah organik di Kota Probolinggo.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Probolinggo dalam pengelolaan sampah organik di Tempat Pembuangan Sampah Ungup-Ungup Kota Probolinggo, dapat disimpulkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup memiliki peran yang sangat penting dalam penyelenggaraan sistem pengelolaan sampah organik di Kota Probolinggo. Peran tersebut tidak hanya terbatas pada kegiatan teknis pengangkutan dan pembuangan sampah, tetapi juga mencakup fungsi regulasi, fasilitasi, operasional, edukasi, serta pengembangan inovasi pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

Sebagai regulator, Dinas Lingkungan Hidup telah melaksanakan tugasnya melalui penerapan

berbagai kebijakan dan peraturan yang mengatur pengelolaan sampah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kebijakan tersebut menjadi dasar dalam mengarahkan pengelolaan sampah menuju sistem yang lebih efektif dengan mengedepankan prinsip pengurangan sampah sejak dari sumbernya. Sebagai fasilitator, Dinas Lingkungan Hidup telah menyediakan berbagai sarana dan prasarana pendukung yang diperlukan dalam proses pengelolaan sampah organik, mulai dari pengumpulan, pengangkutan, hingga pengolahan sampah.

Dalam pelaksanaan fungsi operasional, Dinas Lingkungan Hidup berperan aktif dalam proses pengumpulan, pemilahan, dan pengolahan sampah organik yang masuk ke Tempat Pembuangan Sampah Ungup-Ungup. Sampah organik yang berhasil dipilah kemudian diolah menjadi kompos yang memiliki manfaat bagi lingkungan dan masyarakat. Kegiatan ini memberikan kontribusi terhadap pengurangan volume sampah yang dibuang ke tempat pemrosesan akhir serta mendukung upaya pelestarian lingkungan melalui pemanfaatan kembali sampah organik.

Selain itu, Dinas Lingkungan Hidup juga menjalankan fungsi edukatif melalui berbagai kegiatan sosialisasi, penyuluhan, dan kampanye lingkungan yang bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan sampah. Upaya tersebut menjadi sangat penting mengingat keberhasilan pengelolaan sampah tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif masyarakat dalam melakukan pemilahan dan pengurangan sampah sejak dari sumbernya.

Penelitian ini juga menemukan bahwa Dinas Lingkungan Hidup telah berupaya mengembangkan berbagai inovasi dalam pengelolaan sampah organik sebagai bentuk adaptasi terhadap meningkatnya volume sampah dan keterbatasan kapasitas pengelolaan yang tersedia. Namun demikian, pelaksanaan pengelolaan sampah organik masih menghadapi berbagai kendala, antara lain rendahnya kesadaran masyarakat dalam memilah sampah, keterbatasan sarana dan prasarana, keterbatasan sumber daya manusia, serta meningkatnya jumlah sampah yang dihasilkan masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan pengelolaan sampah organik di Kota Probolinggo memerlukan sinergi yang lebih kuat antara pemerintah, masyarakat, sektor swasta, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya untuk mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang efektif, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji efektivitas program-program inovasi pengelolaan sampah organik yang telah dikembangkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Probolinggo, khususnya dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dan mengurangi volume sampah yang masuk ke tempat pemrosesan akhir.

Penelitian berikutnya juga dapat menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengukur hubungan antara tingkat kesadaran masyarakat, partisipasi dalam pemilahan sampah, dan keberhasilan pengelolaan sampah organik. Pendekatan ini akan memberikan gambaran yang lebih terukur mengenai faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan program pengelolaan sampah. Selain itu, penelitian mendatang dapat memperluas objek penelitian dengan membandingkan pengelolaan sampah organik di beberapa lokasi pengelolaan sampah atau daerah lain sehingga diperoleh model pengelolaan sampah yang lebih efektif dan dapat direplikasi oleh pemerintah daerah lainnya.

Penelitian selanjutnya juga disarankan untuk mengkaji aspek ekonomi sirkular dalam pengelolaan sampah organik, termasuk potensi pengembangan usaha berbasis kompos, biogas, pupuk organik cair, maupun produk turunan lainnya yang dapat meningkatkan nilai tambah ekonomi dari sampah organik. Terakhir, penelitian di masa mendatang dapat menelaah pemanfaatan teknologi modern dalam pengelolaan sampah organik, seperti sistem pengolahan berbasis digital, Internet of Things (IoT), smart waste

management, maupun teknologi pengolahan sampah terpadu yang berpotensi meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sampah di tingkat daerah.

DAFTAR PUSTAKA

1. Akbar, H. U., & Setiady, P. (2000). *Pengantar Statistika*. Bumi Aksara.
2. Arikunto, S. (2000). *Manajemen Penelitian*. PT. Rineka Cipta.
3. Hadi, S. (1995). *Metodologi Research Jilid IV*. Andi Offset.
4. Hadiwiyoto, S. (1983). *Penanganan dan Pemanfaatan Sampah*. PT Inti Idayu Press.
5. Hasim, F., & Hedianto, Y. E. (2010). *Gerakan 3R: Pembentukan Masyarakat Peduli Daur Ulang*. Indonesian Education Promoting Foundation.
6. Kountur, R. (2007). *Metode Penelitian untuk Penulisan Skripsi dan Tesis* (Edisi Revisi). Penerbit PPM.
7. Moleong, L. J. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
8. Mustopadidjaja, A. R. (2003). *Manajemen Proses Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kinerja*. Lembaga Administrasi Negara (LAN).
9. Nazir, M. (2005). *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia.
10. Sejati, K. (2009). *Pengolahan Sampah Terpadu*. Kanisius.
11. Singarimbun, M., & Effendi, S. (Eds.). (1997). *Metode Penelitian Survai* (Edisi Revisi). LP3ES.
12. Sugiyono. (2004). *Metode Penelitian Bisnis*. CV. Alfabeta.
13. Sugiyono. (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif*. CV. Alfabeta.
14. Tim Penebar Swadaya. (2010). *Penanganan & Pengolahan Sampah*. Penebar Swadaya.
15. Tim Penulis PS. (2008). *Penanganan dan Pengolahan Sampah*. Penebar Swadaya.
16. Umar, H. (1999). *Metode Penelitian: Aplikasi dalam Pemasaran*. Gramedia Pustaka Utama.
17. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
18. Usman, H., & Akbar, R. P. S. (2003). *Pengantar Statistika*. PT Bumi Aksara.